



Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Susanto Dwi Antoro

Perjuangkankan Solusi Kurangnya SDM di Tingkat Kelurahan

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Susanto Dwi Antoro menaruh perhatian khusus terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dia tidak hanya menyoroti masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) di tingkat kelurahan. Namun berkomitmen membantu mencari solusi.

TORO mengatakan, berdasar pengawasan pihaknya mayoritas kelurahan di Kota Jogja menghadapi persoalan minimnya personel struktural. Padahal, kelurahan merupakan lapisan terbawah yang langsung

Kami ingin struktur organisasi yang lebih sederhana namun diisi oleh SDM yang kompeten, supaya pelayanan publik di level kelurahan optimal."

Susanto Dwi Antoro
Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja



berinteraksi dengan masyarakat.

Hal itu dibuktikan dengan data forum lurah Kota Jogja yang diterima legislatif. Dari total 45 kelurahan, tercatat baru enam kelurahan yang kebutuhan SDM strukturalnya terpenuhi seratus persen. Sementara sisanya jauh dari kata ideal.

Toro menilai, jika personel struktural kelurahan kurang memadai, maka bisa saja fungsi pelayanan dan pembangunan wilayah menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, Komisi A kini tengah fokus mencari solusi agar permasalahan tersebut bisa segera teratasi.

"Kelurahan memiliki peran vital dalam menyentuh langsung kepentingan masyarakat, sehingga justru jangan sampai terkendala masalah kekurangan SDM," ujarnya kemarin (16/3).

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku, pihaknya tengah bekerja sama dengan tim ahli dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Jogja. Komisi A juga aktif berkomunikasi dengan forum lurah se-Kota Jogja agar bisa memaparkan kendala administratif yang dihadapi di lapangan.

Dalam sebuah *forum group discussion* (FGD) yang diinisiasi oleh DPRD Kota Jogja,



JARING ASPIRASI: Forum group discussion yang diselenggarakan Komisi A DPRD Kota Jogja dengan dihadiri forum lurah Kota Jogja dan organisasi perangkat daerah Pemkot Jogja kemarin (16/3). Sejumlah usulan muncul, salah satunya terkait penyederhanaan struktur organisasi kelurahan.

sejumlah usulan muncul. Salah satunya, permintaan dari forum lurah agar ada penyederhanaan struktur organisasi kelurahan. Supaya kerja perangkat kelurahan bisa lebih efisien dan fleksibel merespon kebutuhan masyarakat.

Toro memastikan, usulan tersebut akan dikaji dan menjadi bahan rekomendasi kepada eksekutif sebagai dasar

pengambilan kebijakan. Rekomendasi yang bakal disampaikan di antaranya meminta agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja menyusun perencanaan pembangunan berbasis wilayah. Lalu, lanjutnya, juga mendorong agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja

untuk menata manajemen distribusi dan pengadaan aparatur. Serta meminta Bagian Organisasi Setda Kota Jogja melakukan penataan kembali struktur kelembagaan kelurahan. "Kami ingin struktur organisasi yang lebih sederhana namun diisi oleh SDM yang kompeten, supaya pelayanan publik di level kelurahan optimal," tegasnya. (*/inu/eno/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005